



DETERMINASI EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

Jauhar Fikrinanda Rahmadi ^{a*}, Parikesit Penangsang ^b

^a fikirahmadi10@gmail.com, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

^b parikesit_1@untag-sby.ac.id, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

* corespondence

ABSTRACT

Regional income is an input in economic development. This sector includes local original income, balancing funds, and other legitimate income which is used as regional government capital in an effort to improve better regional economic development. This research aims to analyze the efficiency of the public sector, namely district/city regional income in East Java Province which consists of local original income (PAD), balancing funds, and other legitimate income as input variables in efforts to carry out economic development as seen from GRDP, HDI, and the number of people who are not poor as output variables for indicators of regional economic development. The results of this research are that there are five regions in East Java Province in 2017-2021 that are efficient, namely Bojonegoro Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency, Kediri City, and Surabaya City, while in 2020 there are six efficient regions, an increase of one other area, namely Regency Banyuwangi, which achieved a relative efficiency level of 100%, is apart from the five regions which were previously efficient in using input to produce output based on analysis using the Data Envelopment Analysis (DEA) method.

Keywords: *Regional income, Economic Development, Efficiency, Inefficiency, Public Sector.*

Abstrak

Pendapatan daerah merupakan input dalam pembangunan ekonomi. Sektor tersebut yaitu meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi sektor publik yaitu pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain-pendapatan yang sah sebagai variabel input dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi yang dilihat dari PDRB, IPM, dan jumlah penduduk yang tidak miskin sebagai variabel output indikator pembangunan ekonomi daerah. Hasil dari penelitian ini terdapat lima daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021 yang efisien yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, dan Kota Surabaya sedangkan pada tahun 2020 terdapat enam daerah yang efisien, bertambah satu daerah lain yaitu Kabupaten Banyuwangi yang mencapai tingkat efisiensi relatif 100% selain lima daerah yang sebelumnya telah efisien dalam penggunaan input untuk menghasilkan output berdasarkan analisis menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Kata Kunci: Pendapatan daerah, Pembangunan Ekonomi, Efisiensi, Inefisiensi, Sektor Publik.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pemerintah telah mendominasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dari proposional rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 80% pendapatan negara telah dihasilkan oleh mekanisme sektor publik (PPA UGM, 2000). Sumber daya yang dimiliki oleh daerah

hendaknya dapat diberdayakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai pelayanan sektor publik yang lebih baik, dan tepat sasaran untuk masyarakat, dengan kata lain bahwa alokasi pengeluaran pemerintah dari berbagai sumber.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak era reformasi yang memiliki tujuan utama yaitu mencapai pemerintahan yang efisien, yang mampu memberdayakan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, disamping itu sistem otonomi daerah bertujuan untuk agar pemerintah daerah dapat secara mandiri mengelola tatanan pemerintahannya termasuk juga dalam bidang pengelolaan keuangan, baik mengelola sumber pendapatan daerah maupun dalam pengeluaran pemerintah. Dasar hukum otonomi daerah antara lain adalah telah disahkannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai perubahan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan menerapkan sistem desentralisasi, proses tata kelola pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran karena sistem desentralisasi telah diberi wewenang untuk menyelenggarakan program-program pembangunan, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan, dan pembiayaan dan pelayanan publik serta pengelolaan asset pemerintah lainnya dapat dijalankan dengan lebih akurat dan juga optimal oleh pemerintah daerah desentralisasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi otoritas yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian fungsi pengelolaan pengeluaran pemerintah dari sumber dana pendapatan daerah yaitu sebagai distribusi anggaran harus dirahkan agar dapat menuntaskan masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan serta problematika dalam proses pembangunan ekonomi daerah, serta dapat diarahkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah dengan memberdayakan sumber daya yang ada di daerah untuk menghasilkan output yang optimal (BPS,2016).

Capaian pendapatan masing-masing daerah kabupaten/kota tersebut bisa terjadi, tidak hanya pada daerah tersebut melainkan pada daerah kabupaten/kota di Indonesia lainnya, hal ini bisa terjadi karena masing-masing daerah memiliki sumber pemasukan pendapatan dari sektor daerah masing-masing yang berbeda menurut potensialnya, serta faktor lain yaitu bagaimana sistem pengelolaan pendapatan daerah masing-masing oleh daerah untuk pengalokasiannya untuk pengeluaran sebagai input untuk menghasilkan pembangunan ekonomi daerah.

Data-data yang telah dirilis tersebut, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah sektor industri pengolahan terbesar di Indonesia, memaparkan bahwa setiap daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur tidak menunjukkan angka yang sama, bahkan relatif cukup besar selisih antar wilayah, hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki sektor dan produk-produk yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan daerah untuk dialokasikan pada pembangunan ekonomi daerah, serta manajemen pengelolaan keuangan yang berbeda dari masing-masing daerah sehingga mengakibatkan tingkat efisiensi daerah dalam mengelola input (sumber daya) yang terdapat di masing-masing daerah untuk menghasilkan sebuah output yang optimal (pertumbuhan ekonomi) berbeda-beda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Daerah

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Kekayaan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD yang sah.

2.3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro 2014). Menurut Adisasmita (2014), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut adalah saling mengisi dan melengkapi.

Menurut UU No. 25/1999 pasal 6 dan UU No. 33/2004 pasal 10, Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil, yang terdiri atas PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam); (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Faktor yang mempengaruhi Dana Perimbangan:

- a. Penerimaan dari pajak dan bukan pajak
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
- d. Dana Bagi Hasil
- e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.4. Lain - lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain adalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Adisasmita, 2014).

2.5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketika orang mengalami berbagai ancaman yang mengancam kesejahteraan hidup mereka, seperti ketidakcukupan konsumsi makanan, kerentanan, pendidikan yang terbatas, dan ketidakmampuan dalam mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh gagalnya infrastruktur pemerintah dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari, termasuk persediaan air bersih, sanitasi dan tempat tinggal, serta kurangnya kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara seajar dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan politik (Tukiran, dkk., 2007).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi setiap penduduk miskin (BPS, 2013).

2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

2.7. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui tingkat atau kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah dengan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2011).

Adisasmita (2014) mengungkapkan bahwa, alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah:

- PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.
- PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.
- Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan dianalisis menggunakan metode analisis DEA. Setelah menetapkan metode pengumpulan data, penelitian melanjutkan dengan pengolahan data menggunakan alat analisis DEA.

Pada penelitian ini, Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan alat analisis yang digunakan untuk operasional secara matematika untuk mengukur tingkat efisiensi teknik suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang memiliki banyak input dan banyak output kemudian membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain.

DEA merupakan perhitungan efisiensi, teknik relatif. Hipotesis untuk hasil perhitungan DEA adalah:

- UKE kurang efisien apabila efisiensi < 100%
- UKE efisien apabila efisiensi = 100%

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Analisis DEA dikatakan efisien apabila mencapai 100%, jika tidak mencapai 100% maka pengujian dikatakan tidak efisien. Variabel yang digunakan yaitu input dan output. Input yang digunakan yaitu data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Output yang digunakan yaitu PDRB, IPM, dan Penduduk tidak Miskin.

Tabel 1 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Persen %)

Kabupaten/ Kota	Tingkat Efisiensi				
	Bangkalan	0,48071	0,49461	0,52492	0,47420
Banyuwangi	0,67268	0,63937	0,75038	1,00000	0,76315
Blitar	0,55815	0,60449	0,65735	0,67062	0,60862
Bojonegoro	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Bondowoso	0,41834	0,38863	0,43102	0,40934	0,40139
Gresik	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Jember	0,51123	0,52314	0,53116	0,50631	0,51319
Jombang	0,39207	0,38409	0,39262	0,41946	0,42385
Kediri	0,47578	0,47574	0,45622	0,47526	0,62287

Lamongan	0,33124	0,35850	0,35363	0,34484	0,40124
Lumajang	0,42452	0,46240	0,44350	0,48502	0,49418
Madiun	0,34628	0,37647	0,40107	0,42461	0,41386
Magetan	0,42521	0,42555	0,41964	0,42498	0,41227
Malang	0,75698	0,75201	0,79438	0,65879	0,64469
Mojokerto	0,79238	0,80718	0,82843	0,94805	0,88145
Nganjuk	0,28139	0,31048	0,32630	0,34736	0,34855
Ngawi	0,38811	0,40387	0,39703	0,40096	0,38420
Pacitan	0,37367	0,37867	0,40562	0,39454	0,37230
Pamekasan	0,36633	0,37168	0,40131	0,42732	0,39746
Pasuruan	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Ponorogo	0,14358	0,15283	0,14411	0,14257	0,16949
Probolinggo	0,24367	0,26824	0,25001	0,27871	0,30838
Sampang	0,24700	0,26503	0,23291	0,20887	0,19236
Sidoarjo	0,55358	0,51596	0,52452	0,54182	0,57133
Situbondo	0,17939	0,32015	0,19916	0,20070	0,20368
Sumenep	0,29882	0,28450	0,23350	0,26284	0,32854
Trenggalek	0,16452	0,16179	0,11381	0,12305	0,15191
Tuban	0,32756	0,30199	0,29920	0,27627	0,31297
Tulungagung	0,20517	0,19099	0,15497	0,17643	0,35199
Kota Batu	0,20933	0,20414	0,19180	0,16358	0,18062
Kota Blitar	0,08768	0,08630	0,06944	0,08082	0,08278
Kota Kediri	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Kota Madiun	0,15345	0,17276	0,12836	0,14638	0,17369
Kota Malang	0,40489	0,38064	0,35287	0,38114	0,38172
Kota Mojokerto	0,08533	0,07124	0,07043	0,08323	0,08188
Kota Pasuruan	0,10323	0,10725	0,10704	0,11895	0,15730
Kota Probolinggo	0,14017	0,12438	0,11826	0,11907	0,12143
Kota Surabaya	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Sumber : BPS diolah

Tabel 1 telah menunjukkan hasil olah data dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), berdasarkan hasil tersebut pada tahun 2017-2021 ada beberapa kabupaten/kota yang mencapai tingkat efisiensi 100% yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, dan Kota Surabaya. Adapun yang Tingkat efisiensi mencapai 100% di tahun tertentu yaitu Kabupaten Banyuwangi. Selain kabupaten/kota yang disebutkan maka masih belum mencapai tingkat efisien.

Kemudian sejalan dengan terdapatnya inefisiensi pada sebagian daerah di Provinsi Jawa Timur menurut data penelitian ini telah ditunjukkan beberapa pengelolaan keuangan yang tidak efisien, berdasarkan perhitungan dengan metode DEA telah ditemukan beberapa pemborosan penggunaan keuangan daerah atau dengan kata lain terdapat pengalokasian keuangan untuk pembangunan ekonomi guna untuk meningkatkan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan yang kurang tepat, berdasarkan data-data penelitian ini yang telah diolah sebagai berikut (tabel 2) :

Tabel 2 Penggunaan Input yang Efisien pada Output yang Dihasilkan dan Pemborosan (Ribu Rupiah) tahun 2017-2021

KABUPATEN/KOTA	Tahun 2017					
	Penggunaan input yang efisien			Pemborosan		
	PAD	DP	LPS	PAD	DP	LPS
Kabupaten Bangkalan	191,26	1.729,80	108,06	0,00000	105,22916	21,51565
Kabupaten Banyuwangi	388,62	2.025,02	279,28	0,00000	0,00000	91,46273
Kabupaten Blitar	216,04	1.863,93	114,49	0,00000	87,78621	23,99316
Kabupaten Bojonegoro	329	2.599	108,89	0,00000	0,00000	0,00000

Kabupaten Bondowoso	153,75	1.561,05	283,13	0,00000	144,94365	97,15696
Kabupaten Gresik	949,66	1.742,57	239,57	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Jember	526,36	2.806,06	183,63	11,08750	0,00000	0,00000
Kabupaten Jombang	344,42	1.612,60	384,24	0,00000	0,00000	99,84738
Kabupaten Kediri	291,32	2.026,45	134,01	0,00000	0,00000	16,04643
Kabupaten Lamongan	413,03	2.051,79	146,91	5,10723	0,00000	0,00000
Kabupaten Lumajang	254,66	1.543,54	106,44	0,00000	0,00000	6,61099
Kabupaten Madiun	179,02	1.477,16	115,72	0,00000	21,80039	19,55404
Kabupaten Magetan	147	1.402,23	101,58	0,00000	102,46533	22,50520
Kabupaten Malang	426,3	2.717,44	258,29	0,00000	0,00000	81,79666
Kabupaten Mojokerto	436,21	1.480,03	364,84	0,00000	0,00000	175,73958
Kabupaten Nganjuk	308,56	1.817,21	118,03	0,00000	0,00000	2,02178
Kabupaten Ngawi	166,81	1.638,30	86,99	0,00000	124,41040	12,33442
Kabupaten Pacitan	139,13	1.323,76	73	0,00000	83,95330	10,07094
Kabupaten Pamekasan	146,87	1.498,56	72,75	0,00000	123,94001	8,84315
Kabupaten Pasuruan	498,91	2.221,53	189,3	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Ponorogo	225,13	1.738,61	138,74	0,00000	109,04725	7,11445
Kabupaten Probolinggo	219,69	1.688,59	137,23	0,00000	178,63440	12,23071
Kabupaten Sampang	133,55	1.159,67	237,44	0,00000	142,97306	45,57963
Kabupaten Sidoarjo	1.310,07	2.209,74	330,83	148,25895	0,00000	0,00000
Kabupaten Situbondo	170,4	1.256,08	159,35	0,00000	92,38052	16,47542
Kabupaten Sumenep	191,95	1.817,31	81,38	0,00000	293,58412	1,59402
Kabupaten Trenggalek	175,92	1.418,17	88,44	0,00000	107,43871	3,08388
Kabupaten Tuban	327,38	1.823,83	124,02	4,69588	151,44248	0,00000
Kabupaten Tulungagung	300,12	1.977,49	127,67	0,00000	137,91813	1,79941
Kota Batu	124,06	587,12	51,46	0,00000	9,95509	0,48369
Kota Blitar	123	596,35	60,85	0,00000	5,38318	1,06272
Kota Kediri	202,31	879,89	80,15	0,00000	0,00000	0,00000
Kota Madiun	159,32	706,45	61,21	0,73922	5,29165	0,00000
Kota Malang	409,47	1.195,21	177,35	0,00000	0,00000	14,50340
Kota Mojokerto	163,31	551,42	63,48	0,00000	0,00000	0,37487
Kota Pasuruan	129,63	651,09	63,79	0,00000	9,01200	1,28354
Kota Probolinggo	152,48	691,81	52,49	2,80168	16,19979	0,00000
Kota Surabaya	4.212,57	2.267,80	1.101,72	0,00000	0,00000	0,00000

KABUPATEN/KOTA	Tahun 2018			Pemborosan		
	Penggunaan input yang efisien PAD	DP	LPS	PAD	DP	LPS
Kabupaten Bangkalan	207,66	1.659,73	202,77	0,00000	39,44589	39,85838
Kabupaten Banyuwangi	527,38	2.164,50	288,86	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Blitar	224,74	1.803,65	266,68	0,00000	56,65190	81,27100
Kabupaten Bojonegoro	368,16	2.801,14	216,62	0,00000	0,00000	0,00000

Kabupaten Bondowoso	186,42	1.538,21	136,49	0,00000	46,57181	10,41650
Kabupaten Gresik	947,57	1.719,16	230,77	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Jember	589,28	2.646,55	362,53	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Jombang	402,07	1.568,46	484,4	0,00000	0,00000	79,68953
Kabupaten Kediri	452,81	2.071,47	165,89	0,00000	150,10341	0,00000
Kabupaten Lamongan	471,57	2.073,10	253,73	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Lumajang	264,05	1.590,39	193,58	0,00000	0,00000	12,43173
Kabupaten Madiun	185,51	1.437,71	164,95	0,00000	9,88602	21,00643
Kabupaten Magetan	165,66	1.444,72	124,26	0,00000	78,42808	11,39965
Kabupaten Malang	489,33	2.758,23	471,53	0,00000	0,00000	118,44066
Kabupaten Mojokerto	474,79	1.429,73	412,37	0,00000	0,00000	138,32105
Kabupaten Nganjuk	329,47	1.587,91	206,32	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Ngawi	180,78	1.640,88	152,55	0,00000	107,19507	18,65151
Kabupaten Pacitan	155,22	1.301,56	123,91	0,00000	45,65599	12,33722
Kabupaten Pamekasan	163,64	1.419,28	142,06	0,00000	64,75603	17,01403
Kabupaten Pasuruan	572,57	2.198,58	395,3	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Ponorogo	235,84	1.804,14	214,98	0,00000	146,96117	17,29121
Kabupaten Probolinggo	220,81	1.718,83	216,82	0,00000	249,46737	32,58427
Kabupaten Sampang	137,25	1.201,20	331,47	0,00000	188,40758	72,14319
Kabupaten Sidoarjo	1.431,05	2.131,84	483,37	0,00000	0,00000	144,39438
Kabupaten Situbondo	185,01	1.180,82	134,45	0,00000	166,44090	17,46775
Kabupaten Sumenep	221,3	1.819,55	139,71	0,00000	292,74366	12,56094
Kabupaten Trenggalek	199	1.414,85	146,15	0,00000	113,88723	9,74279
Kabupaten Tuban	378,16	1.712,03	189,51	0,00000	109,04220	7,91735
Kabupaten Tulungagung	359,28	1.904,28	212,51	0,00000	118,55861	10,95675
Kota Batu	143,5	712,39	79,3	0,00000	40,77639	3,53889
Kota Blitar	140,06	650,44	81,67	0,00000	12,95298	1,82887
Kota Kediri	225,91	807,05	97,55	0,00000	0,00000	0,00000
Kota Madiun	196,8	650,49	61,37	0,00000	20,25333	0,00000
Kota Malang	486,33	1.173,53	304,65	0,00000	0,00000	65,87003
Kota Mojokerto	200,64	616,45	75,04	0,00000	0,00000	0,16752
Kota Pasuruan	139,47	656,77	83,23	0,00000	17,00159	2,46737
Kota Probolinggo	167,53	656,43	89,84	0,00000	7,20652	2,17654
Kota Surabaya	4.712,86	2.200,61	1,214,74	0,00000	0,00000	0,00000

Tahun 2019

KABUPATEN/KOTA	Penggunaan input yang efisien			Pemborosan		
	PAD	DP	LPS	PAD	DP	LPS
Kabupaten Bangkalan	215,94	1.874,84	217,88	0,00000	561,35236	45,03212
Kabupaten Banyuwangi	571,7	2.365,43	233,27	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Blitar	237,31	1.912,93	212,32	0,00000	675,62147	44,14562
Kabupaten Bojonegoro	482,55	3.933,21	214,51	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Bondowoso	193,33	1.699,76	143,08	0,00000	421,81994	10,69753

Kabupaten Gresik	909,91	1.822,96	307,75	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Jember	630,62	2.665,89	375,29	0,00000	19,67248	0,00000
Kabupaten Jombang	439,13	1.693,86	516,43	0,00000	21,96684	97,29526
Kabupaten Kediri	391	2.256,87	295,34	0,00000	364,28375	25,62305
Kabupaten Lamongan	503,99	2.154,34	280,97	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Lumajang	310,87	1.675,54	254,72	0,00000	228,85545	28,63183
Kabupaten Madiun	200,52	1.581,08	166,61	0,00000	334,15649	17,62748
Kabupaten Magetan	192,75	1.430,44	127,62	0,00000	298,57351	4,07636
Kabupaten Malang	525,97	3.031,08	444,59	0,00000	849,40582	97,59137
Kabupaten Mojokerto	501,07	1.769,71	242,87	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Nganjuk	342,77	1.683,82	211,67	0,00000	132,25511	0,65132
Kabupaten Ngawi	211,01	1.765,17	160,37	0,00000	388,34740	12,42485
Kabupaten Pacitan	166,32	1.432,09	127,87	0,00000	329,25542	10,59939
Kabupaten Pamekasan	173,69	1.556,60	140,55	0,00000	364,68816	13,76602
Kabupaten Pasuruan	643,35	2.399,63	393,54	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Ponorogo	247,54	1.857,98	200,92	0,00000	138,47261	12,91132
Kabupaten Probolinggo	233,48	1.940,68	202,58	0,00000	273,65213	24,39583
Kabupaten Sampang	149,92	1.488,87	152,3	0,00000	220,23204	19,76887
Kabupaten Sidoarjo	1.603	2.127,23	496,26	0,00000	0,00000	19,60863
Kabupaten Situbondo	189,33	1.419,73	76,62	3,77593	159,79170	0,00000
Kabupaten Sumenep	254,49	2.048,64	138,3	0,00000	263,00913	5,56893
Kabupaten Trenggalek	280,17	1.572,81	162,38	0,00000	63,44607	4,14045
Kabupaten Tuban	396,86	1.822,16	170,1	5,57346	135,07520	0,00000
Kabupaten Tulungagung	439,53	2.008,52	199,69	0,00000	64,41787	0,31349
Kota Batu	153,33	744,68	85,71	0,00000	36,25316	3,21338
Kota Blitar	173,65	701,61	81,67	0,00000	5,02104	0,24828
Kota Kediri	224,56	813,8	100,99	0,00000	0,00000	0,00000
Kota Madiun	206,49	785,55	107,31	0,00000	4,77957	1,85438
Kota Malang	533,51	1.289,52	278,33	0,00000	0,00000	29,71909
Kota Mojokerto	205,92	630,8	89,39	0,00000	0,00000	0,35209
Kota Pasuruan	139,03	682,48	69,15	0,00000	19,12221	0,70915
Kota Probolinggo	175,93	761,55	135,16	0,00000	14,66263	6,62743
Kota Surabaya	5.190,30	2.401,96	1.166,55	0,00000	0,00000	0,00000

Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA	Penggunaan input yang efisien			Pemborosan		
	PAD	DP	LPS	PAD	DP	LPS
Kabupaten Bangkalan	261,8	1.819,34	218,99	0,00000	452,83176	33,11968
Kabupaten Banyuwangi	595,21	772,3	1.972,26	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Blitar	263,66	1.874,81	243,58	0,00000	673,48538	62,61859
Kabupaten Bojonegoro	843,28	3.018,06	223,36	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Bondowoso	232,93	1.679,35	144,06	0,00000	372,61156	4,65028
Kabupaten Gresik	1.163,67	1.834	416,97	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Jember	750,02	2.793,79	417,1	0,00000	156,01445	0,00000

*Determinasi Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur
(Jauhar Fikrinanda Rahmadi)*

Kabupaten Jombang	467,36	1.693,12	518,19	0,00000	62,92213	105,67808
Kabupaten Kediri	424,92	2.197,61	322,87	0,00000	377,65317	38,39829
Kabupaten Lamongan	554,42	2.176,42	345,97	0,00000	119,26421	10,38599
Kabupaten Lumajang	320,54	1.662,38	299,51	0,00000	292,96970	56,69888
Kabupaten Madiun	219,45	1.516	177,77	0,00000	335,91399	22,39826
Kabupaten Magetan	222,6	1.519,82	122,82	0,00000	331,99868	0,00000
Kabupaten Malang	715,98	2.948,22	465,68	0,00000	384,88079	38,07035
Kabupaten Mojokerto	542,34	1.732,04	233,5	31,58674	0,00000	0,00000
Kabupaten Nganjuk	367,11	1.791,46	217,27	0,00000	201,24066	2,82344
Kabupaten Ngawi	238,29	1.768,69	174,19	0,00000	393,71173	15,41178
Kabupaten Pacitan	194,71	1.385,44	135,08	0,00000	292,96498	9,52974
Kabupaten Pamekasan	184,41	1.499,57	157,87	0,00000	380,61431	22,56791
Kabupaten Pasuruan	731,16	2.414,12	416,54	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Ponorogo	295,96	1.859,69	221,91	0,00000	116,82473	14,13234
Kabupaten Probolinggo	244,68	1.975,96	224,64	0,00000	311,01375	34,31662
Kabupaten Sampang	198,96	1.508,87	159,92	0,00000	169,08389	16,16128
Kabupaten Sidoarjo	1.810,10	2.196,29	530,2	0,00000	0,00000	34,45974
Kabupaten Situbondo	197,1	1.410,39	140,23	0,00000	144,02038	11,73251
Kabupaten Sumenep	266,8	1.998,46	142,39	0,00000	278,78156	8,33219
Kabupaten Trenggalek	302,58	1.508,67	166,38	0,00000	54,77306	5,02639
Kabupaten Tuban	564,66	1.845,75	190,99	28,81623	62,88421	0,00000
Kabupaten Tulungagung	446,58	1.936,13	200,64	0,00000	64,64607	2,71076
Kota Batu	207,03	703,13	89,9	0,00000	0,00000	0,93001
Kota Blitar	174,02	655,39	91,12	0,00000	3,53319	1,52941
Kota Kediri	251,28	883,24	104,25	0,00000	0,00000	0,00000
Kota Madiun	235,5	736,52	84,88	4,52437	2,54537	0,00000
Kota Malang	731,1	1.275,09	283,13	0,00000	0,00000	25,98882
Kota Mojokerto	205,94	590,49	89,39	0,00000	0,00000	1,08659
Kota Pasuruan	142,87	625,49	80,59	0,00000	14,66793	2,53571
Kota Probolinggo	200,98	740,2	136,65	0,00000	4,02004	6,34252
Kota Surabaya	5.584,63	2.360,28	1.138,17	0,00000	0,00000	0,00000

KABUPATEN/KOTA	Tahun 2021					
	Penggunaan input yang efisien			Pemborosan		
	PAD	DP	LPS	PAD	DP	LPS
Kabupaten Bangkalan	262,47	1.734,28	226,31	0,00000	415,37011	39,50799
Kabupaten Banyuwangi	592,74	2.200,95	242,63	0,00000	59,13318	0,00000
Kabupaten Blitar	284,05	1.766,78	229,22	0,00000	555,34438	49,64119
Kabupaten Bojonegoro	691,31	2.894,85	202,58	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Bondowoso	233,31	1.614,27	151,66	0,00000	366,29365	12,19395
Kabupaten Gresik	1.132,30	1.710,22	429,02	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Jember	716,85	2.569,37	422,14	0,00000	212,12492	25,40398
Kabupaten Jombang	477,85	1.899,18	232,82	0,00000	161,45770	0,00000

Kabupaten Kediri	425,69	2.198,81	152,75	0,00000	350,01843	0,00000
Kabupaten Lamongan	467,69	2.036,82	425,93	0,00000	252,85103	73,35108
Kabupaten Lumajang	307,95	1.572,64	256,02	0,00000	319,45852	47,41153
Kabupaten Madiun	220,77	1.471,90	125,14	0,00000	334,36106	4,29497
Kabupaten Magetan	218,92	1.455,44	136,72	0,00000	328,58113	9,44897
Kabupaten Malang	715,98	2.817,38	470,79	0,00000	428,05884	63,56962
Kabupaten Mojokerto	540,12	1.682,16	233,5	29,04787	0,00000	0,00000
Kabupaten Nganjuk	359,76	1.580,96	193,65	0,00000	173,90051	2,31330
Kabupaten Ngawi	242,03	1.730,23	155,21	0,00000	385,08165	11,29408
Kabupaten Pacitan	200,69	1.317,69	134	0,00000	265,85688	11,04843
Kabupaten Pamekasan	194,57	1.464,23	151,65	0,00000	349,37679	20,07438
Kabupaten Pasuruan	724,01	2.177,56	376,36	0,00000	0,00000	0,00000
Kabupaten Ponorogo	271,64	1.720,74	213,44	0,00000	150,92509	15,75468
Kabupaten Probolinggo	241,65	1.876,62	217,85	0,00000	350,94865	34,12793
Kabupaten Sampang	228,94	1.500,48	142,05	0,00000	154,02770	7,79137
Kabupaten Sidoarjo	1.609,82	2.014,32	586,68	0,00000	0,00000	87,09041
Kabupaten Situbondo	212,06	1.322,64	183,77	0,00000	137,37827	18,27232
Kabupaten Sumenep	231,59	1.936,73	142,92	0,00000	403,73460	13,20690
Kabupaten Trenggalek	268,64	1.421,09	165,75	0,00000	91,14551	7,07830
Kabupaten Tuban	480,01	1.683,81	196,3	11,71804	103,62831	0,00000
Kabupaten Tulungagung	436,04	1.849,53	108,69	67,22774	387,38392	0,00000
Kota Batu	200	689,97	108,8	0,00000	14,21054	3,62880
Kota Blitar	187,33	605,3	92,95	0,00000	2,70962	0,81628
Kota Kediri	272,35	832,43	120,8	0,00000	0,00000	0,00000
Kota Madiun	226,89	692,15	84,74	6,22499	18,79500	0,00000
Kota Malang	776,69	1.198,11	276,09	0,00000	0,00000	17,09943
Kota Mojokerto	202,83	580,06	86,8	0,00000	0,00000	0,05529
Kota Pasuruan	133,36	594,95	52,52	2,35175	36,65613	0,00000
Kota Probolinggo	216,83	671,85	136,23	0,00000	1,10687	4,86398
Kota Surabaya	5.561,56	2.069,38	1.029,46	0,00000	0,00000	0,00000

Sumber : BPS Diolah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan analisis per unit (tabel 2), telah menunjukkan seberapa besar dana yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebaiknya digunakan untuk mencapai efisiensi 100% dan dalam hasil tersebut juga telah menunjukkan seberapa besar pemborosan dana yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha peningkatan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan pada masing-masing daerah yang telah terindikasi tidak efisien relatif 100% dalam pengelolaan keuangan pada sektor tersebut, pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017-2021 rata-rata pemborosan pada kabupaten/kota di Jawa Timur terletak pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel input yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, yaitu dalam peningkatan PDRB, peningkatan IPM dan

pengentasan kemiskinan sebagai ukuran tingkat capaian kesejahteraan masyarakat dalam menikmati adanya pembangunan ekonomi.

Inefisiensi terjadi karena adanya indikasi bahwa daerah yang mengalami inefisiensi dikarenakan adanya pemborosan dalam penggunaan variabel input. Untuk mengatasi inefisiensi yang menyebabkan pemborosan penggunaan variabel input maka dalam hasil analisis DEA telah ditunjukkan cara mengatasi inefisiensi dengan mengurangi penggunaan input berdasarkan hasil analisis DEA. Kemudian untuk daerah yang mengalami inefisiensi agar mencapai tingkat efisiensi 100% dapat mengacu pada daerah lain yang sudah mencapai efisiensi relatif 100% yang telah ditunjukkan dalam analisis DEA.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan dapat mempertahankan demi kemajuan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan agar mampu menekan penggunaan inputnya dan mengimbangi outputnya. Jika dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masing-masing daerah tersebut, faktor lain yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, faktor-faktor sosial, birokrasi, politik, dan budaya serta kondisi geografis. Namun demikian adanya perbedaan sumber daya dan faktor-faktor lain bukanlah menjadi hambatan untuk mendapatkan output yang maksimal. Yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah pengawasan dan evaluasi penggunaan setiap input agar tidak terjadi pemborosan yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana penggunaan dana input terhadap sektor-sektor yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan agar pada masa yang akan datang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adismita, Rahardjo. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- [3] Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- [4] Chusnah, S. (2014). *Efisiensi sektor publik dan kinerja ekonomi daerah (studi kasus kabupaten/kota di Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- [5] Kurnia, Akhmad Syakir. 2006. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 11, No. 2.
- [6] Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi*, Edisi 17. Alih bahasa oleh Nur Rosyidah, Anna Elly, dan Bosco Carvallo. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi.
- [7] Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17. Alih bahasa oleh Gretta, Theres Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi.
- [8] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [9] Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Erlangga.